

DAMPAK PENGELOLAAN OBJEK WISATA BONO TERHADAP KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Oleh: Ahmad Rizki Safitra

Dosen Pembimbing: Zulkarnaini, S.Sos, M.si

rizkisafitraa@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas Km 12,5 Simp Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761 63277

Abstract

Research on the impact of Bono tourism management on community economic empowerment. Is an activity carried out to strive for something to better and solve problems contained in the management of Bono attractions that is not the government in the mangement of Bono attractions and inadequate facilities and infrastructure, the purpose of this study was to determine the impact of Bono tourism object management on the economic empowerment of the community and to find out what factors hinder Bono tourism object management. the study uses the concept of quoting theory from Sujianto (2009) explaining that there are 5 discourses of development in comunity empowerment namely independence, partisipative, networking, justice and sustainability. The outhor uses qualitative reseach methods by studying data descriptively. In collection data reseachers used interview, observation, and documentation techiques. From the results of this study it can be seen that the impact of Bono attraction mangement on the economic empowerment of the community has not been managed properly. there are still many facilities and infrastructure that have not been properly managed.

Keywords : Management, Empowerment

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi suatu daerah berpengaruh dan berdampak nyata terhadap perekonomian nasional. Karena itu, laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan perekonomian nasional. Kegiatan perekonomian daerah mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk didalamnya aktivitas kepariwisataan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang saat ini digalakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas. Tujuan pengembangan dan pemberdayaan pariwisata di Indonesia terlihat dengan jelas dalam peraturan presiden No. 67 Tahun 1969, Bab 1 Pasal 3, segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha ojek

dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Berdasarkan peraturan Presiden tersebut, bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan pariwisata adalah terjadinya peningkatan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya. Karena dalam industri pariwisata berdampak pada perluasan kesempatan serta lapangan kerja, serta mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang devisa lainnya.

Indonesia kaya akan obyek-obyek pariwisata yang tersebar di seluruh wilayah.

Kini insan-insan pariwisata Indonesia harus mampu mencari strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan bisnis ekonomi maupun hambatan politik dan budaya dari luar untuk maju menjadi salah satu peluang dan alternatif. Paling sedikit dengan tujuan mencegah pariwisata Indonesia menjadi mundur ke belakang. Pariwisata telah menjadi salah satu devisa terbesar untuk dapat bersaing dengan negara lain dan dapat menarik wisatawan untuk datang ke Negara mereka. Setiap Negara berusaha mengembangkan dan mengelola pariwisata mereka. Dengan mengembangkan dan mengelola pariwisata, di harapkan dapat melestarikan nilai-nilai kebudayaan, agama, lingkungan hidup, dan tentunya juga dapat meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di kawasan wisata, sekaligus dapat memperkenalkan keindahan Indonesia serta meningkatkan persahabatan dengan bangsa-bangsa di dunia.

Sektor pembangunan yang menarik perhatian di Negara kita ini adalah pembangunan di bidang pariwisata.

Pariwisata di harapkan dapat memacu dan memobilisasi pertumbuhan ekonomi masyarakat, devisa negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah wisata itu sendiri. Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, Bab II pasal 3, Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohanidan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Wisata alam Bono merupakan sumber daya alam yang terletak di muara sungai kampar kelurahan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Wisata alam Bono merupakan wisata fenomenal dan menarik perhatian banyak wisatawan. Wisata alam ini memiliki ombak atau gelombang yang cukup besar di muara sungai, yang dimanfaatkan untuk berselancar. Melihat orang berselancar di sungai menjadi suatu hal yang luar biasa, sehingga wisata alam bono menjadi fenomenal dan menarik perhatian wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Bono yang artinya benar bagi masyarakat setempat, yang dulunya gelombang bono suatu gelombang yang menakutkan bagi masyarakat, sekarang masyarakat menganggap Bono sebagai sahabat alam yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di kelurahan Teluk Meranti.

Kelurahan Teluk Meranti adalah sebuah Kelurahan yang terletak di Kabupaten Pelalawan. Untuk menuju ke Kelurahan Teluk Meranti dapat ditempuh dengan menggunakan roda dua, roda empat dan juga menggunakan *speed boat*. Kondisi alam Kelurahan Teluk Meranti merupakan daerah dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Sungai Kampar, se-bagian besar bergambut kering. Jarak tempuh untuk mencapai

Kelurahan Teluk Meranti ini dari Pekanbaru (Ibukota Propinsi) mencapai \pm 150 km, dan dari ibu kota Kabupaten Pelalawan mencapai \pm 100 km. Hal ini memberikan informasi bahwa Kelurahan Teluk Meranti cukup terisolir dan masih sulit untuk menjangkaunya ditambah lagi dengan kondisi infrastruktur jalan yang tidak layak. Sehingga dengan jarak yang demikian memakan waktu yang cukup lama dan melelahkan. Di Kelurahan Teluk Meranti terdiri dari beberapa suku yaitu, suku melayu 98%, batak 0,3%, Jawa 0,7, dan minang 1%, dengan mayoritas Agama Islam mencapai 99,9%.

Wujud dan arah pembangunan yang dipangku oleh Kelurahan Teluk Meranti diwujudkan dalam bentuk visi pembangunan :

“Terwujudnya Kelurahan Teluk Meranti sebagai Kelurahan yang maju dan sejahtera dengan didukung oleh pertanian yang unggul, infrastruktur yang baik, sosial ekonomi masyarakat yang tinggi dalam masyarakat yang beradab, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Sedangkan Misi Kelurahan Teluk Meranti adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bermartabat dan berbudaya
2. Meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pengelolaan yang baik
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, air bersih, mutu pendidikan dan kesehatan
4. Menggalakkan sektor pertanian, peternakan dan meningkatkan sumber daya manusia

Melalui wawancara peneliti dengan Lurah Kelurahan Teluk Meranti bahwa memiliki kondisi alam yang kaya, ini dibuktikan dengan berdirinya perusahaan-perusahaan raksasa yang berada di kelurahan ini seperti PT. RAPP dan PT. Mekar Sari yang mengelola Perkebunan Kelapa Sawit, namun rata-rata masyarakat Kelurahan Teluk Meranti masih hidup di bawah garis kemiskinan, ini menandakan bahwa perusahaan besar tersebut tidak memberikan kontribusi positif bagi desa-desa dimana mereka berada terutama Kelurahan Teluk Meranti.

Kelurahan Teluk Meranti digalakkan sebagai sentra utama untuk wisata Bono. Wisata ini diharapkan akan membawa dampak perubahan ke arah yang positif terhadap ekonomi dan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan umumnya. Dewasa ini Kecamatan Teluk Meranti memiliki 9 desa/kelurahan. Ke sembilan desa/kelurahan tersebut memiliki variasi yang beragam yaitu desa Kualo Panduk, Petodaan, Pulau Muda, Pangkalan Terap, Teluk Binjai, Gambut Mutiara, Labuhan Bilik, Segamai dan Kelurahan Teluk Meranti. Masyarakat Kelurahan Teluk Meranti yang dahulunya bekerja memanfaatkan hutan (*illegal Logging*), setelah hutan habis mereka tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidupnya karena kebanyakan dari masyarakat tersebut tidak memiliki keahlian tertentu yang dapat menunjang kembali kehidupan mereka.

Saat ini mata pencaharian penduduk Kelurahan Teluk Meranti sebagian besar sebagai Petani dan berkebun yaitu sudah memulai menanam Kelapa Sawit, Memelihara sarang burung Walet dan Getah karet, namun masih baru memulai sehingga belum merasakan

hasilnya dan tidak semua masyarakat mempunyai lahan untuk menanam sawit dan getah karet, hanya masyarakat yang mempunyai lahan yang bisa menanam sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai lahan terpaksa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Disamping itu umumnya juga masyarakat Kelurahan Teluk Meranti menggantungkan hidupnya dari sektor perairan secara umum. Potensi lahan yang terdapat di Kelurahan Teluk Meranti meliputi :

1. Sawah, tegalan.
2. Ladang.
3. Hutan rakyat.
4. Perkebunan dan
5. Perikanan.

Ombak Bono adalah fenomena unik yang terjadi di Sungai Kampar Kabupaten Pelalawan, fenomena ombak bono ini berpusat di Kelurahan Teluk Meranti, fenomena alam ini yang datang sebelum pasang, Bono terjadi akibat pertemuan arus Sungai Kampar dengan Laut Cina Selatan dan arus Selat Malaka. Ketinggian gelombangnya mencapai 4-6 meter dan di iringi dengan suara gemuruh yang kencang. Pada zaman dahulu ombak bono sangat ditakuti oleh masyarakat dan para pelayar yang memasuki daerah Teluk Meranti, hal ini dikarenakan kuatnya hempasan dari ombak tersebut yang mampu menghancurkan perahu-perahu pelayar, setelah kedatangan tim ekspedisi penjelajah sungai, fenomena gelombang Bono dijadikan sebagai objek surfing para peselancar lokal maupun peselancar mancanegara.

Dengan adanya potensi wisata ombak bono ini tentunya akan membawa banyak manfaat. Apabila dikelola dengan baik dan sesuai dengan harapan akan membawa dampak besar terhadap

perekonomian serta kehidupan masyarakat di sekitar objek wisata Bono, hal-hal seperti berjualan, membuat kerajinan, jasa serta lainnya tentunya akan mendatangkan keuntungan besar dan masyarakat tidak hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai pencaharian utama mereka.

Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui objek wisata Bono yang ada di Kelurahan Teluk Meranti, tidak terlepas dari campur tangan pihak pemerintah terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, oleh karena itu Dinas Kebudayaan, pariwisata, pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Pelalawan sering melakukan event-event untuk mengembangkan dan mempromosikan objek wisata Bono kepada wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Dengan diadakannya acara rutin tahunan yaitu festival Bekudo bono dan Bono jazz yang di adakan setiap akhir tahun dan juga diadakannya acara mandi belimau yang di adakan setiap menyambut bulan Ramadan setiap tahunnya. sehingga dengan event-event seperti ini mampu menciptakan peluang-peluang usaha oleh masyarakat serta bertujuan untuk menarik dan mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara sekaligus bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Teluk Meranti.

Potensi jumlah kunjungan wisatawan pada kawasan objek wisata bono di Kecamatan Meranti baik wisatawan lokal maupun mancanegara setiap tahunnya terjadi peningkatan dan juga penurunan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Pengunjung

| No | Tahun | Wisat wan Manca negara | Wisata wan Domes tik | Total kunjun gan |
|----|-------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 2014 | 63 | 9.392 | 9.455 |
| 2 | 2015 | 105 | 12.500 | 12.605 |
| 3 | 2016 | 67 | 762 | 829 |
| 4 | 2017 | 81 | 5.752 | 5.833 |

Wisatawan wisata Bono

Sumber: *Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, 2018*

Dari tabel 1.1 di atas jelas terlihat pada tahun 2014 pengunjung yang datang ke kawasan objek wisata bono berjumlah 9455 jiwa. Kemudian tahun 2015 jumlah tersebut meningkat menjadi 12605 jiwa, namun pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 11778 jiwa, kemudian pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 5006 jiwa dari tahun sebelumnya sehingga meningkat menjadi 5833 jiwa.

Hasil wawancara penulis dengan Lurah Teluk Meranti bahwa Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata bono terhadap keberdayaan masyarakat di sekitar kawasan objek wisata Bono yaitu, belum optimalnya perhatian pemerintah daerah hal ini dapat di lihat dari akses jalan yang belum di aspal serta sehingga jalan menuju objek wisata Bono sulit untuk di lalui apalagi ketika musim penghujan jalan akan menjadi banjir. Pada kenyataannya kondisi baik atau jelek nya jalan menuju objek wisata Bono ini akan berdampak besar terhadap kunjungan wisatawan yang datang baik wisatawan lokal maupun mancanegara

Selain masalah jalan yang belum di kelola dengan baik di tambah lagi belum lengkapnya sarana prasarana wisata seperti hotel/penginapan yang belum memadai, masih kurangnya jasa transportasi baik transportasi darat maupun air di tambah lagi biaya jasa transportasi yang cukup mahal berdampak pada minat wisatawan yang datang.

Masalah lain yang juga di hadapi yaitu masalah perekonomian masyarakat dengan adanya pengelolaan objek wisata bono ini yaitu belum mampu membuat perubahan besar terhadap perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata Bono, melalui wawancara penulis dengan masyarakat di kawasan objek wisata Bono bahwa seharusnya adanya bantuan dari pemerintah terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan-pelatihan terkait kegiatan ekonomi wisata seperti usaha wisata membuat kerajinan tangan serta produk-produk wisata lainnya serta bantuan modal untuk menunjang kegiatan-kegiatan perekonomian yang lakukan, pada kenyataannya selama ini masyarakat hanya berinisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan perekonomian dengan modal yang seadanya sehingga masyarakat belum begitu banyak untuk melakukan kegiatan perekonomian, apabila pengelolaan ekonomi masyarakat juga bisa di benahi tentunya masyarakat akan lebih berdaya dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap objek wisata Bono ini akan berdampak besar terhadap peningkatan kemiskinan serta kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar objek wisata Bono.

Sejalan dengan yang di jelaskan diatas Kelurahan Teluk Meranti sebagai salah satu daerah yang memiliki beragam obyek wisata yang kaya dan berpotensi bagi pengelolaan dan keberdayaan

ekonomi masyarakat, namun berbagai permasalahan selalu terjadi Sehingga belum optimal pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan di kawasan objek wisata Bono

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan masyarakat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan masyarakat?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor menghambat pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan dan pengelolaan wisata lokal yang dimiliki daerah. Serta dapat menjadi referensi dalam hal keilmuan pengelolaan objek wisata terhadap keberdayaan masyarakat.

2. Secara Praktis

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah yang berjudul **“Dampak Pengelolaan Objek Wisata Bono terhadap Keberdayaan Ekonomi Masyarakat”**.

- a. Penelitian diharapkan memberi masukan kepada masyarakat Kelurahan Teluk Meranti agar lebih partisipatif dalam mengembangkan dan mengelola obyek wisata guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat.
- b. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan, Sebagai bahan masukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui objek wisata.
- c. Bagi peneliti, Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan peneliti dan untuk menetapkan ilmu pengetahuan yang di dapat pada mata kuliah di program studi Ilmu Administrasi Publik.

KONSEP TEORI

1) Pemberdayaan Masyarakat

Menurut **Zulkarnaini & Dadang (2018:30)** adalah kegiatan mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana sosial dalam lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan keterbelakangan. Sedangkan Pengembangan merupakan upaya untuk mendorong terjadinya perubahan social yang sistematis terencana dan terkontrol. Perencanaan dan pengawasan yang teratur menjadi cara pendekatan untuk menggerakkan masyarakat agar terjadi perubahan ke arah perbaikan

Menurut **Kidervatter** dalam **Ariefianto (2015)** adalah memberdayakan masyarakat bertujuan mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri dan mampu membantu

diri mereka. Tujuan yang akan di capai dari pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat yang mandiri, berswadaya serta berinovasi.

Menurut **Novianti, dkk. (2018:75)** pemberdayaan yaitu meningkatkan merupakan kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya untuk terus menerus memperbaiki kehidupan secara terus menerus agar terjadi perubahan ekonomi

Menurut **Hasan & Aziz (2018:139)** adalah penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan keberanggungjawaban dimaknai sebagai mendapatkan kekuatan (power) dan mengaitkan dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi asas dari kekuasaan dalam suatu sistem maupun organisasi.

menurut **Triyono (2014:117)** mengatakan program pemberdayaan masyarakat meningkatkan pendidikan, perekonomian masyarakat dalam keseimbangan lingkungan serta membentuk masyarakat mandiri bahwa pemberdayaan adalah upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi.

Menurut **Fitrianti (2014 : 207)** pemberdayaan memberikan kesempatan untuk membuka usaha di sekitar objek wisata dengan tujuan menggerakkan perekonomian agar perekonomian masyarakat meningkat dan menuju ke kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan menurut **Darwis & Rustam (2016:47)** mengatakan bahwa pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat agar meretaskan kemiskinan masyarakat budaya dan politik sejatinya merupakan proses. Dalam mengevaluasi proyek pembangunan masyarakat, siapa pun harus melihat proses, dan dalam merencanakan dan menerapkan program pengembangan masyarakat apapun senantiasa merupakan proses, bukan hasil yang harus diberikan pertimbangan mendalam. Orang-orang yang menekankan pada pernyataan hasil perlu menyadari bahwa untuk pengembangan masyarakat, proses yang baik merupakan hasil terpenting yang dapat dicapai. Proses yang baik akan mendorong masyarakat untuk menentukan tujuan mereka sendiri, dan tetap menguasai perjalanan selain tujuan akhir.

Menurut **Eni & Zulkarnaini (2014:91)** mengemukakan upaya memperkuat penguasaan masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi yang dilakukan dengan memperkuat kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akses modal sempitnya peluang dan kesempatan kerja terbatas menjadi masalah utama dan ketertinggalan masyarakat lapisan bawah.

Sedangkan menurut **Saugi & Sumarno (2015:227)** pemberdayaan masyarakat adalah strategi perubahan sosial secara terencana serta masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat mandiri dengan melakukan upaya-upaya mendorong perubahan hidup .

Selanjutnya **Wakerkwa (2015:203)** mengemukakan tiga tema penting yang dianggap penting sangat menentukan bagi konsep pemberdayaan yang berpusat pada masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menagani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa kandatipun sektor modern merupakan sumber utama bagi perutmbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin.
3. Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber.

Menurut **Effendi, dkk.(2014:152)** pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya menumbuhkan serta meningkatkan inisiatif, kreatif masyarakat dalam mengatasi kendala perekonomian masyarakat berguna ke arah yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut **Miradj& Sumarno (2014:49)** strategi pemberdayaan ekonomi adalah pengupayaan menjadi prioritas penting dalam pembangunan kita sekarang dan masa yang akan datang upaya demikian perlu memerlukan bentuk hal penting yaitu :

1. Kontribusi Oleh pemerintahan daerah yang di harapkan oleh pemerintahan pusat.
2. Aspirasi masyarakat daerah itu sendiri terutama yang terfleksi pada prioritas program-program
3. Keterkaitan daerah dengan perekonomian lokal

Menurut **Nafidah & Suryaningtyas (2015:227)** pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan yang merujuk serangkaian tindakan yang di lakukan

secara sistematis mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya agar menjadi masyarakat yang berdaya, berkekuatan dan berkemampuan menuju keberdayaan serta meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku serta kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Menurut **Malik & dwiningrum (2014:132)** pemberdayaan adalah perubahan budaya masyarakat agar terciptanya mental kewirausahaan diantaranya yaitu mempunyai visi ke depan sebagai sasaran yang akan di tuju.

2) Pemberdayaan Ekonomi

menurut **Sumodingrat (2000:6)** secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- b. Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, moderen, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke

kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur meliputi : pengalokasian sumber daya pemberdayaan sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pembeberdayaan sumber daya manusia

- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

Menurut **Kartasasmita(2006:34)** pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya yang merupakan pengarah sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberdaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilik faktor-faktor produksi, penguatan kekuasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapat gaji/upah yang memadai.

Menurut **Wayan Suarja (2007)** pemberdayaan usaha skala mikro adalah kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu:

- a. Penigkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat usaha wirausaha baru, dan penyediaan skim-skim pembiyaan alternatif untuk usaha.
- b. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian serta fasilitas pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong kemiskinan.
- c. Penigkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas layanan LKM dan KSP di sektor pertanian dan perdesaan.
- d. Pengembangan usaha mikro dan menengah melalui pendekatan sistem jaringan antar LKM dan Bank.

Menurut **Ndraha (2003:184)** pemberdayaan ekonomi adalah kekuatan pengikat atau penggerak pola perilaku suatu bangsa yang harus terus menerus dipelihara serta menjadi kekayaan suatu bangsa yang menjadi modal bagi kejayaan masa depan.

Menurut **Jhingan (2004:55)** bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional, jika kenaikan pendapatan itu kurang dibarengi dengan penyesuaian budaya. Wawasan sosial buadaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan diharapka dapat berjalan, manakah terdapat hambatan sosial yang menghalangi kemajuan ekonomi, hambatan tersebut harus disingkirkan atau disesuaikan oerganisasi sosial seperti keluarga bersama, sistem kasta, warana kulit, norma agama dan kehidupan desa harus di modifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.

Menurut **Tjokrowinoto (2014:95)** pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan dampak sosial dari pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi amat bervariasi, antara lain terjadinya konsentrasi dan marginalisasi kekayaan dan kekuasaan, terjadinya proses kemanusiaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas berdasarkan hasil penelitian yaitu dampak pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat. Lokasi penelitian ini akan di lakukan di kawasan objek wisata Bono, data data yang berkaitan akan di dapatkan dari Kantor Lurah Kelurahan Teluk Meranti. Informan penelitian ini Lurah Teluk beserta masyarakat Krlurahan Teluk Meranti. Jenis dan sumber data pada penelitian ini ada data primer dan data sekunder, data primer di peroleh dari wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder di peroleh dari artikel-artikel, media massa serta foto-foto hasil observasi.

HASIL

A. Dampak pengelolaan objek wisata Bono Terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan permasalahan ke dalam 5 (empat) indikator pemberdayaan yang dapat menerangkan bagaimana dampak pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat agar masyarakat lebih berdaya dengan adanya

pengelolaan objek wisata Bono. Penulis meneliti dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Sujianto dengan indikatornya sebagai berikut : Kemandirian, Partisipatif, Jaringan Kerja, Keadilan dan Keberlanjutan

1. Kemandirian

Kemandirian merupakan sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu dorongan sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi tanpa meminta bantuan atau bergantung dari orang lain dan dapat bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah di ambil melalui berbagai pertimbangan sebelumnya dapat dikatakan seseorang tersebut telah mandiri ialah apabila mampu memecahkan masalah yang dihadapi sendiri, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan, bisa manajemen mengatur atas dorongan atau keinginan sendiri dan memikirkan inisiatif yang mampu membawa suatu perubahan baik pada dirinya sendiri maupu lingkungan sekitarnya. Begitu pada pengelolaan objek wisata Bono dan Terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat dapat di katakan mandiri apabila mereka mampu memecahkan masalah mereka sendiri sehingga tidak tergantung pada pihak lain, namun pada kenyataan masyarakat di kawasan objek wisata Bono belum mandiri ini dikerenakan belum di rasakanya dampak pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan masyarakat secara optimal. Melalui pengelolaan yang di lakukan oleh pemerintah daerah pada masyarakat Kelurahan Teluk Meranti yaitu perubahan kearah yang lebih baik. Namun pada kenyataan masyarakat di kawasan objek

wisata Bono belum mandiri dengan adanya pengelolaan Objek wisata ini dikarenakan masih belum mempunyai masyarakat menciptakan kegiatan ekonomi pada umumnya serta masih belum mengandalkan objek wisata Bono sebagai sebuah peluang usaha perkenomian masyarakat. Aspek Kemandirian merupakan kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan dengan menciptakan peluang-peluang yang ada serta memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga tidak bergantung pada orang lain. Sikap melakukan sesuatu dorongan sendiri untuk memulai menjalankan kehidupan sosial serta dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup agar menuju kehidupan yang lebih baik serta mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.

2. Partisipatif

Merupakan gerakan warga untuk terlibat dalam proses pengelolaan dan pembangunan yang menuju ke arah perubahan kehidupan yang lebih baik. Bentuk keterlibatan dapat di kontribusi dalam bentuk ide-ide terkait dengan arahan tersebut, keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai penerima program dalam pembangunan yaitu :

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan program pembangunan harus dilaksanakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting bahwa walaupun dalam tahap pertama

usaha pembangunan dengan titik berat pada pengarahannya dan daya orang kebanyakan bersedia menerima pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan anggota keluarga setempat.

- b. Partisipasi dalam pelaksanaan. Dalam hal ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
- c. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil. Setiap usaha bersama manusia bersama manusia dalam pembangunan misalnya bagaimanapun ditunjukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakat. Oleh sebab itu, anggota masyarakat berhak berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi yaitu dari aspek manfaat, sosial dan manfaat pribadi.
- d. Partisipasi dalam evaluasi. Sudah umum diketahui bahwa setiap penyelenggaraan apapun dalam kehidupan bersama, hanya dapat dilihat berhasil apabila ini sudah sepantasnya masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah di capai.

Pengelolaan merupakan langkah yang sangat penting untuk gerak pembangunan partisipatif. Pelaksanaan pembangunan partisipatif haruslah bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat supaya terlibat secara langsung dalam tiap-tiap proses

pembangunan, sebagai proses pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi untuk memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya yang diberdayakan

3. Jaringan Kerja

Dalam pengelolaan objek wisata Bono Terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat, di perlukan suatu jaringan kerja dengan adanya jaringan kerja dapat menciptakan kegiatan-kegiatan yang lebih ekonomis dan tidak ragu-ragu dalam mendayagunakan berbagai sumber yang dibutuhkan. Adanya hubungan atau kerjasama sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun manfaat dengan adanya jaringan kerja yaitu :

- a. Untuk melengkapi raancangan
- b. Untuk memperbaiki metode perencanaan dan pengawasan
- c. Memperbaiki komunikasi dan pengambilan keputusan secara umum untuk mempertinggi efektifitas manajemen dalam menyelesaikan kegiatan
- d. Untuk menghemat biaya
- e. Untuk menghemat waktu
- f. Mempertinggi daya guna (efisiensi) kerja, baik manusia maupun peralatan serta menjamin ketepatannya.

Suatu kegiatan pasti terdapat jaringan kerja, dimana dalam kegiatan tersebut memerlukan koordinasi antar pemerintah atau antar dinas terkait dan memerlukan informasi yang relevan atau kontinue agar suatu kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, selain itu dengan adanya suatu jaringan kerja dalam sebuah kegiatan maka sangat membantu dalam melakukan komunikasi terkait arahan

atau sasaran dari kegiatan pengelolaan tersebut.

Kegiatan pengelolaan merupakan kegiatan yang merupakan kegiatan lintas sektor, maka diperlukan suatu koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif antar pihak yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kelurahan Teluk Meranti untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, efektif, efisien mengenai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini ialah pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait pengelolaan objek wisata Bono Terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat.

Bertujuan untuk melengkapi rancangan, menghemat biaya, waktu dan mempertinggi daya guna (efisiensi) kerja, baik manusia maupun peralatan serta menjamin terlaksananya suatu pemberdayaan. Pencapaian jaringan kerja di dapat dari informasi, koordinasi dan komunikasi.

4. Keadilan

Keadilan merupakan keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak baik berupa keuntungan maupun kerugian. Dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau memberlakukan kepada setiap orang secara proposional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntunan agar sesamanya dapat memberlakukan sesuai hak dan kewajibannya.

menurut **Rasuanto (2015 : 33)** adalah prioritas dan sekaligus acuan bagi keutamaan lain, sejalan dengan prioritas yang hak atas yang baik. Keadilan sosial tidak mengklaim hendak menghapus hak kesamaan melainkan hendak memastikan terjaminnya kesamaan akses dan kesempatan khususnya atas nikmat-nikmat primer sosial. Keadilan ialah milik setiap individu yang ada di masyarakat yang bersifat menyeluruh yang berlaku untuk masyarakat yaitu tidak adanya diskriminasi atau merugikan satu diantara banyak pihak yang terlibat sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara, masyarakat Kelurahan Teluk Meranti mengharapkan keadilan dapat dirasakan dari pemerintah, serta pemerintah daerah berupaya untuk menangani masalah yang terjadi di kehidupan mereka, maka pemerintah melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tujuannya adalah agar mereka mampu meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada melalui objek wisata Bono di Kelurahan Teluk Meranti ini.

5. Berkelanjutan

Pengelolaan ekonomi masyarakat seharusnya mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Kelurahan Teluk Meranti serta mampu mengkomodir berbagai aspek yang berkembang dan dibutuhkan oleh masyarakat di Kelurahan Teluk Meranti mereka membutuhkan kesejahteraan hidup. Selain itu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil apabila membawa perubahan secara optimal serta mampu berjalan secara berlanjut, mandiri dan berkembang upaya pengelolaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan memerlukan

komitmen dari pemerintah daerah, legislatif, pelaku ekonomi, masyarakat serta organisasi-organisasi non pemerintah, ini diharapkan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti yang lebih mandiri dan berdaya.

A. Faktor-faktor Yang Menghambat Pengelolaan Objek Wisata Bono Terhadap Keberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana

Sangat minimnya dana yang direalisasikan pemerintah daerah sehingga pengelolaan objek wisata Bono yang dilakukan berjalan tidak optimal. Dalam pengelolaan ini tentunya memerlukan dana untuk pelaksanaan agar setiap pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Berbentuk ide atau tenaga dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, sehingga setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan semestinya tentunya sangat diperlukan partisipasi masyarakat, menurut observasi penulis pada laporan-laporan kegiatan yang di serahkan ke kelurahan seperti belum memiliki inovasi.

3. Keadilan

Pada faktor ini sangatlah penting dikarenakan dalam pengelolaan objek wisata Bono belum berjalan sesuai yang membutuhkannya apabila pengelolaannya sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan tentunya akan membawa dampak positif bagi masyarakat di Kelurahan Teluk Meranti. Masyarakat

tidak perlu pusing lagi memikirkan pendapatan mereka karena mereka memiliki potensi wisata yang cukup baik untuk menunjang perekonomian.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukandampak pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat belum tercapai sesuai apa yang di harapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya bahwa pengelolaan objek wisata Bono belum terkelola dengan baik ini di buktikan dengan jalannya yang rusak serta belum di aspal juga sarana prasarana yang belum lengkap dan memadai sehingga mempengaruhi minat pengunjung yang datang ke kawasan objek wisata Bono serta dampak pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat pada kenyataannya masyarakat belum berdaya ini dikarena lemahnya peran pemerintah terhadap pengelolaan objek wisata Bono sehingga setiap kegiatan perekonomian serta masyarakat di kawasan objek wisata Bono belum mandiri ini karena dampak pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan masyarakat belum di rasakan oleh masyarakat kawasan objek wisata Bono.
2. Faktor penghambat pengelolaan objek wisata Bono terhadap keberdayaan ekonomi masyarakat, dihambat oleh dana karena setiap pengelolaan yang di laksanakan

tidak terlepas dari dana, akibat dari kurangnya dana yang di berikan pemerintah daerah sehingga pengelolaan objek wisata Bono tidak tercapai dengan semestinya

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, V., & Rusastra, I. W. (2016). Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi program puap dengan desa mandiri pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(2), 125-142.
- Effendi, A. D., Barkey, R. A., & Jamil, M. H. (2014). Strategi pengembangan program pemberdayaan masyarakat pada model desa konservasi di Taman Nasional Taka Bonerate. *Jurnal Sains & Teknologi*, 14(2), 151-161
- Edi, Suharto 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Refika Aditama, Bandung
- Fitrianti, H. (2014). Strategi Pengembangan Desa Wisata Talun Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1).
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*.
- Jhingan, Arifin. 2004. *Kebijakan Publik dan Trasparansi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*. Bandung; Alfabeta

- Novianti, N., Suryono, Y., & Fauziah, P. Y. Kemitraan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi pada program sekolah lapangan kakao. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1), 74-84.
- Kartasmita, Apilia 2006. *Manajemen Kebijakan Publik*. Penerbit Kanisuis Yogyakarta
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239.
- Ndraha, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bilat dan Utuh*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Malik, A., & Dwiningrum, S. I. A. (2014). Keberhasilan program desa vokasi terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Gemawang Kabupaten Semarang. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(2), 124-135.
- Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan nonformal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera Barat. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(1), 101-112.
- Sujianto. 2009. *Analisa Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta
- Sumoningrat. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta
- Saugi, W., & Sumarno, S. (2015). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(2), 226-238.
- Tjokro, Winoto. *Teori Administrasi Publik*. Bandung; Alfabeta
- Triyono, A. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga)* Pt. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap.
- Wayan, Suarja. 2007. *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press
- Wakerkwa, G. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Sektor Pendidikan Di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(15), 74-85.
- Zulkarnaini, Z., & Mashur, D. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Melalui Penguatan Kelembagaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 27-36.